

DAFTAR ISI

Hal

PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG RKPD TAHUN 2018

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Alur Penyusunan RKPD	I-6
1.5. Sistematika.....	I-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografis	II-1
2.1.1.1. Topografi	II-2
2.1.1.2. Hidrologi	II-3
2.1.1.3. Klimatologi	II-4
2.1.2. Aspek Demografi	II-5
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-6
2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi.....	II-6
2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-11
2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-13
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-17
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-17
2.2. Prasarana dan Sarana Daerah	II-22
2.2.1 Transportasi	II-22
2.2.2 Telekomunikasi	II-26

2.2.3	Air Minum	II-27
2.2.4	Listrik	II-28
2.3.	Evaluasi Pembangunan Kabupaten Malinau	II-29
2.3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2016	II-31
2.3.1.1	Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2016.....	II-31
2.4.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-31
2.4.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	II-31
BAB III	RANCANGAN EKONOMI KABUPATEN MALINAU BESERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	III-6
3.1.2.1.	Tantangan.....	III-6
3.1.2.2.	Prospek.....	III-8
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-11
3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-10
3.2.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-11
3.2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-14
3.2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-16
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kesatu	IV-1
4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kedua.....	IV-2
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Ketiga	IV-3
4.1.4.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Keempat	IV- 5
4.1.5.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kelima	IV- 6
4.1.6.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Keenam.....	IV- 7

4.1.7. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Ketujuh	IV- 9
4.1.8. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kedelapan.....	IV-10
4.1.9. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kesembilan.....	IV- 12
4.1.10.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kesepuluh.....	IV- 13
4.1.11.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Sebelas.....	IV- 15
4.1.12 .Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kedua Belas.....	IV- 16
4.2. Prioritas dan Pembangunan	IV- 18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF	V-1
5.1. Rencana Kerja	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Penyusuna RKPd 2018 I - 6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Malinau Menurut Kecamatan Tahun 2015	II - 5
Tabel 2.2	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau Tahun 2011 -2015 (Rp. Miliar)	II - 6
Tabel 2.3	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015 (Rp.Miliar)	II - 7
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015(%)	II - 9
Tabel 2.5	Struktur Ekonomi Kabupaten Malinau tahun 2011-2015(%).....	II - 10
Tabel 2.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau Tahun 2010-2015.....	II - 12
Tabel 2.7	Banyaknya kelompok Kesenian di Kabupaten Malinau Tahun 2010-2014	II - 14
Tabel 2.8	Banyaknya Anggota Kelompok Seni di Kabupaten Malinau Tahun 2010-2014	II - 14
Tabel 2.9	Banyaknya Sarana Gedung/Tempat Kesenian di Kabupaten Malinau Tahun 2010-2014	II - 14
Tabel 2.10	Banyaknya Kelompok/Klub Olahraga di Kabupaten Malinau Tahun 2012	II - 15
Tabel 2.11	Banyaknya Anggota/Atlit Olahraga Di Kabupaten Malinau Tahun 2012	II - 16

Tabel 2.12	Banyaknya Sarana Gedung /tempat/Lapangan Olahraga Dan Jenis Olah raga Di Kabupaten Malinau Tahun 2012	II – 16
Tabel 2.13	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2015	II – 18
Tabel 2.14	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Dan Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2015	II – 19
Tabel 2.15	Jumlah Mahasiswa dan Lulusan politeknik di Kabupaten Malinau 2010-2015	11-19
Tabel 2.16	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2015	II - 21
Tabel 2.17	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2015.....	II - 22
Tabel 2.18	Panjang Jakan Menurut Jenis Jalan di Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015 (Km)	II – 24
Tabel 2.19	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Malinau 2015 (Km).....	II - 24
Tabel 2.20	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Malinau 2015 (Km).....	II - 25
Tabel 2.21	Persentase Rumah tangga Menurut Kepemilikan Telepon Seluler, PC Komputer dan Laptop Tahun 2010-2013)	II - 26
Tabel 2.22	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Malinau 2010-2013 (%)	II - 27
Tabel 2.23	Jumlah Pelanggan Air Minum Menurut Kategori di Kabupaten Malinau 2010-2013 (%)	II – 28

Tabel 2.24	Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi dan Terjual Menurut Pelanggan di Kabupaten Malinau 2010-2013 (dalam Mwh).....	II - 28
Tabel 2.25	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Malinau Tahun 2010-2013	II - 29
Tabel 3.1	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau tahun 2011-2015 (Rp. Miliar).....	III - 1
Tabel 3.2	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Malinau tahun 2011-2015 (Rp. Miliar)	III - 2
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015 (%)	III - 4
Tabel 3.4	Struktur Ekonomi Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015 (%)	III - 5
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2011 s/d 2017	III - 11
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2011 s/d 2017	III - 16
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi /Target pembiayaan Daerah Tahun 2011 s/d 2017	III - 17
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021	IV - 1
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Malianu 2016 -2021	IV - 3
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Malinau 2016 - 2021	IV - 4

Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Keempat RPJMD Kabupaten Malianu 2016 -2021	IV - 5
Tabel 4.5	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kelima RPJMD Kabupaten Malinau 2016 -2021	IV - 6
Tabel 4.6	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Keenam RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021	IV - 8
Tabel 4.7	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ketujuh RPJMD Kabupaten Malianu 2016-2021	IV - 9
Tabel 4.8	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kedelapan RPJMD Kabupaten Malinau 2016 -2021	IV - 10
Tabel 4.9	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesembilan RPJMD Kabupaten Malianu 2016 -2021	IV - 12
Tabel 4.10	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesepuluh RPJMD Kabupaten Malinau 2016 -2021	IV - 14
Tabel 4.11	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesebelas RPJMD Kabupaten Malinau 2016 -2021	IV - 15
Tabel 4.12	Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesebelas RPJMD Kabupaten Malinau 2016 -2021	IV - 16
Tabel 4.13	Program Pembangunan Daerah.....	IV - 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan, dan juga merupakan proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 150 ayat (3) mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 Tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah.

RKP Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Malinau tahun 2017 sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaan, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang akan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2018 ini disusun mengacu pada: 1) RPJM Daerah Kabupaten Malinau 2016-2021 ; 2) RKP Tahun 2017.

Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten malinau Tahun 2017 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, serta mempertimbangkan sinergitas antarsektor dan antarwilayah. RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama.

Penanggung jawab penyusunan RKPD adalah Kepala Bappeda yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan kepala SKPD dan melibatkan pelaku pembangunan lainnya. Sebagai Dokumen Rencana pembangunan tahunan, RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, serta menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;

4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – undang 32 tahun 2004 Tentang 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu N0.3 Tahun 2005 Jo Undang – undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kabupaten Tahun 2005;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025.
21. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 57 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016 ;

1.3 MAK SUD DAN TUJUAN

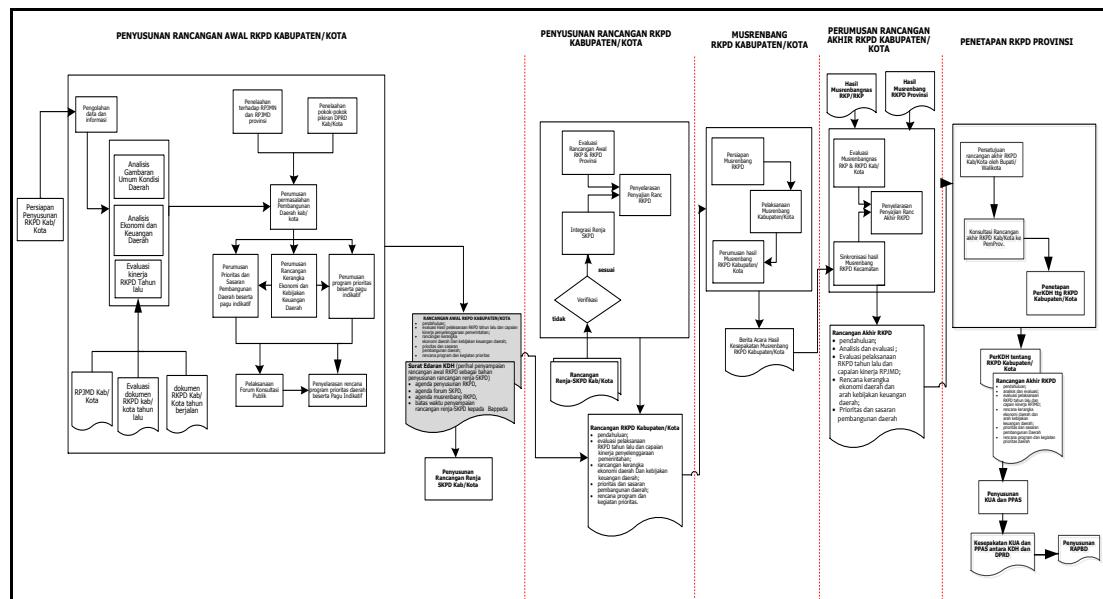
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun dengan maksud mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bottom – up, melalui Visi Pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.
 2. Menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2018.
 3. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
 4. Menyusun berbagai Kebijakan dan Program Kabupaten Malinau yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan ke depan.

1.4 Alur Penyusunan RKPD

Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Tahun 2018



1.5 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Alur Penyusunan RKPD
- 1.5 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016

- 2.1 Visi dan Misi Pembangunan jangka Menengah Daerah
- 2.2 Evaluasi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Malinau
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016
- 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI KABUPATEN MALINAU

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1 Perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Malinau
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

BAB V RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

- 5.1. Rencana Kerja
- 5.2. Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah pemekaran Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Malinau terletak di bagian utara sebelah barat Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, yaitu Negara Bagian Serawak dan Sabah di sebelah Barat. Batas wilayah Kabupaten Malinau, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Nunukan, sebelah Timur dengan Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kutai Barat, dan sebelah Barat dengan Negara Malaysia Timur-Serawak.

Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 40.088,41 Km² terletak pada posisi 1° 21'36"- sampai dengan 4° 10' 55" Lintang Utara dan 114° 35'22" sampai dengan 116°50' 55" Bujur Timur. Kondisi geografis Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Secara umum untuk daerah datar (0-2 %) seluas 107,89 ha; bergelombang (2-15 %) seluas 70,66 ha; curam (15-40 %) seluas 1.957,96 ha; sedangkan sangat curam (>40 %) seluas 10.861,89 ha, dengan ketinggian diatas permukaan laut 7-1.000 m.

Daerah aliran sungai terdapat dataran rendah khususnya di Kecamatan Malinau sepanjang kiri dan kanan Sungai Malinau, Sungai Simendorut, Sungai Sembuak dan Sungai Salap dan sebagian kecamatan di sekitar ibukota Kecamatan Mentarang.

Selanjutnya kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah Utara Bagian Barat, perbukitan sedang di bagian Tengah dan dataran bergelombang landai di bagian Timur. Perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas permukaan laut, sedangkan perbukitan di sebelah Selatan bagian Tengah ketinggiannya berkisar antara 500 m-1.500 m di atas permukaan laut.

2.1.1.1 Topografi

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan daerah dengan topografi bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 0-2.000 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah yang subur pada umumnya di kawasan sepanjang sungai, khususnya di Kecamatan Malinau, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, sepanjang kiri kanan Sungai Malinau, kiri kanan Sungai Semendurut, Sungai Sembuak dan Salap, serta sebagian di sekitar ibukota Kecamatan Mentarang. Wilayah Kabupaten Malinau berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 500-2.000 meter di atas permukaan laut sebagian besar ditumbuhi hutan belantara yang berada di Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh.

Kemiringan tanah di Malinau cukup bervariasi dari 0-2 persen sampai lebih dari 40 persen. Dataran rendah terdapat di daerah Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat yang terletak di pinggiran aliran sungai. Sedangkan sebagian besar dataran tinggi terdapat di Kecamatan Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Bahau Hulu, Sungai Boh dan sebagian Kecamatan Mentarang serta Kecamatan Mentarang Hulu, mulai dari Paking, Semamu, Long Berang sampai dengan Long Pala.

Daerah dengan kemiringan lahan kurang dari 2 persen jarang terjadi erosi dan sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan, terutama padi dan palawija. Namun lahan dengan kemiringan kurang dari 2 persen ternyata luasnya relatif kecil. Sementara pemanfaatan lahan rawa yang tergenang permanen harus memerlukan rekasaya lahan melalui pembuatan kanal atau saluran drainase.

Daerah dengan kemiringan lahan 3-15 persen adalah kawasan yang potensial untuk pengembangan pertanian pangan dan perkebunan dengan pembuatan teras gulud atau teras bangku. Sedangkan peruntukan daerah dengan kemiringan lahan 15-40 persen terbatas hanya untuk perkebunan dengan konservasi tanah.

2.1.1.2 Hidrologi

Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar terutama dengan adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Bengalun dan sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya. Aliran sungai besar ini sangat penting dalam menunjang kebutuhan air baku, transportasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan kawasan hutan yang dapat menyerap air dalam jumlah sangat besar yang selanjutnya menghasilkan potensi air sangat besar memalui aliran sungai dan anak-anak sungai. Sungai Malinau berfungsi sebagai sumber air baku dan penyediaan air minum bagi penduduk di sepanjang wilayah sungai, serta transportasi air yang menghubungkan antardesa di kecamatan (transportasi lokal) dan antarwilayah (transportasi regional).

2.1.1.3 Klimatologi

Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Karakteristik iklim Kabupaten Malinau termasuk iklim tropika humida dengan curah hujan berkisar antara $2500 > 4500$ milimeter per tahun. Temperatur udara rata-rata 26° C dengan perbedaan temperatur siang dan malam yang cukup tinggi. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan November sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Distribusi curah hujan di Kabupaten Malinau dapat dibagi menjadi 4 (empat) zone, yaitu:

- Zone 1 : Zone dengan curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun membujur mulai sebelah selatan Kecamatan Mentarang ke arah Kecamatan Malinau.
- Zone 2 : Zone dengan curah hujan antara 3.000-3.500 mm/tahun membujur mulai dari sebelah utara Mentarang ke arah timur Kecamatan Pujungan sampai barat daya Kecamatan Malinau.
- Zone 3 : Zone dengan curah hujan antara 3.500-4.000 mm/tahun membujur mulai dari Kecamatan Malinau sampai Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, serta membujur mulai dari Kecamatan Pujungan ke arah timur Kecamatan Kayan Hilir.
- Zone 4 : Zone dengan curah hujan > 4.000 mm/tahun membujur mulai dari Kecamatan Kayan Hilir ke arah Kecamatan Kayan Hulu.

2.1.2 Aspek Demografi

Perkembangan kondisi kependudukan mencerminkan dinamika pembangunan daerah yang diukur dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Pemahaman tentang perkembangan jumlah penduduk, struktur penduduk, serta penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau akan sangat penting dalam merumuskan langkah-langkah yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Data kependudukan tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 77.492 jiwa yang terdiri dari 41.801 laki-laki dan 35.691 perempuan dengan rasio penduduk menurut jenis kelamin adalah 117,12, dan angka kepadatan penduduk 1,93 jiwa/km². Persebaran penduduk di Kabupaten Malinau menunjukkan ketidakmerataan yang sebagian besar terpusat di Kecamatan Malinau Kota, yaitu 30,76 persen kemudian disusul Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Barat masing-masing sebesar 16,18 persen dan 13,03 persen. Sedangkan persentase penduduk terkecil ada di Kecamatan Sungai Tubu dan Kecamatan Mentarang Hulu dengan persentase masing-masing sebesar 1,30 persen dan 1,21 persen. Persebaran penduduk di sebelas kecamatan lainnya berkisar antara 2-7 persen:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Malinau Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah		Penduduk		Angka kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
		RT	Desa	Km ²	%	Jumlah	%	
1	Sungai Boh	17	6	3.112,18	7,76	2.660	3,43	0,85
2	Kayan Selatan	13	5	3.138,59	7,83	2.119	2,73	0,68
3	Kayan Hulu	20	5	735,40	1,83	3.139	4,05	4,27
4	Kayan Hilir	15	5	11.863,19	29,59	1.674	2,16	0,14
5	Pujungan	21	9	6.539,39	16,31	2.229	2,88	0,34
6	Bahau Hulu	13	6	3.098,98	7,73	1.808	2,33	0,58
7	Sungai Tubu	13	5	2.243,78	5,60	1.007	1,30	0,45
8	Malinau Selatan Hulu	27	8	2.171,14	5,42	2.397	3,09	1,10

9	Malinau Selatan	29	9	1.153,35	2,88	4.850	6,26	4,21
10	Malinau Selatan Hilir	21	8	572,20	1,43	2.656	3,43	4,64
11	Mentarang	34	9	535,15	1,33	5.546	7,16	10,36
12	Mentarang Hulu	11	7	2.924,65	7,30	936	1,21	0,32
13	Malinau Utara	49	12	1.091,19	2,72	12.537	16,18	11,49
14	Malinau Barat	43	9	767,12	1,91	10.101	13,03	13,17
15	Malinau Kota	54	6	142,07	0,35	23.833	30,76	167,76
Jumlah		380	109	40.088,41	100,00	77.492	100,00	1,93

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka 2016

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

(1) Pertumbuhan PDRB

Perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Malinau selama kurun waktu 2010-2015 cenderung terus meningkat. Pada tahun 2011, nilai PDRB Kabupaten Malinau sebesar Rp.5.433,27 miliar meningkat menjadi Rp.6.842,38 miliar pada tahun 2015. Kenaikan yang cukup besar ini dipicu oleh peningkatan nilai tambah dari kegiatan primer, yaitu pertambangan dan penggalian terutama pertambangan batu bara, konstruksi, dan pertanian. Peningkatan nilai PDRB menunjukkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi di Kabupaten Malinau.

Tabel 2.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Malinau tahun 2011-2015 (Rp. Miliar)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	887,50	858,69	851,10	861,49	883,18
B	Pertambangan dan Penggalian	2.565,85	2.301,15	2.750,37	3.081,06	3.274,95
C	Industri Pengolahan	171,42	174,07	181,60	194,68	211,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,18	1,35	1,35	1,43	2,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,11	3,54	3,67	3,98	4,20
F	Konstruksi	712,38	843,30	924,74	1.025,05	1.064,55

G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190,72	199,88	219,81	243,01	253,49
H	Transportasi dan Pergudangan	182,10	192,41	196,76	211,53	219,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	77,70	86,25	99,43	108,73	118,61
J	Informasi dan Komunikasi	23,33	26,24	20,85	22,35	23,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,09	10,55	11,91	12,78	14,61
L	Real Estat	11,91	14,80	15,95	16,02	17,59
M,N	Jasa Perusahaan	9,17	10,97	10,40	11,97	12,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	447,94	547,60	640,66	528,08	501,17
P	Jasa Pendidikan	74,16	90,76	100,57	129,76	159,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	62,70	80,10	72,71	75,79	77,90
R,S,T, U	Jasa lainnya	3,01	3,51	3,65	3,94	4,22
PDRB		5.433,27	5.445,17	6.105,53	6.531,64	6.842,38

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2016.

Sementara nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 juga terus meningkat dari Rp. 4.894,69 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp.6.431,01 miliar pada tahun 2015 sehingga pertumbuhan ekonomi selama tahun 2011-2015 tercatat sebesar 6,49 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh perkembangan sektor perdagangan dan sektor pengangkutan yang memberi andil cukup besar dalam memacu pertumbuhan.

Tabel 2.3
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Malinau tahun 2011-2015 (Rp. Miliar)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	829,53	809,42	779,02	762,74	775,22
B	Pertambangan dan Penggalian	2.201,31	2.285,53	2.773,31	3.277,29	3.486,33
C	Industri Pengolahan	166,56	162,13	157,87	159,57	164,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,26	1,50	1,57	1,73	1,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,13	3,54	3,73	4,00	4,12
F	Konstruksi	665,63	725,49	790,08	873,04	857,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	185,87	195,35	207,94	223,27	228,84

	Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	174,16	178,72	178,97	188,13	191,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	75,11	76,97	81,39	91,01	93,18
J	Informasi dan Komunikasi	23,06	25,18	22,29	20,99	21,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,59	9,21	10,05	10,00	11,16
L	Real Estat	11,27	12,74	13,07	13,66	13,97
M,N	Jasa Perusahaan	8,62	9,72	9,17	9,65	9,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	409,28	448,32	504,46	414,17	392,83
P	Jasa Pendidikan	68,68	83,83	91,58	105,15	113,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59,96	70,90	63,43	60,30	61,57
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,69	3,10	3,08	3,20	3,42
PDRB		4.894,69	5.101,64	5.691,02	6.217,90	6.431,01

Sumber : BPS, Kabupaten Malinau Dalam Angka 2016

Perubahan tahun dasar penghitungan nilai PDRB menyebabkan terjadinya perubahan dalam penghitungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau. Data BPS menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 3,97 persen kemudian meningkat menjadi 11,55 persen pada tahun 2013 yang merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar sejak terbentuknya Kabupaten Malinau. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan nilai tambah sektor pertambangan dan perkebunan, serta sektor sekunder dari sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Dalam dua tahun terakhir, penurunan permintaan komoditas pertambangan dan perkebunan membawa dampak terjadinya penurunan produksi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah percepatan dan pemulihan ekonomi daerah dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan melalui optimalisasi pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, mengoptimalkan program dan

kegiatan dari seluruh SKPD, dan mengembangkan kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015 (%)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-8,19	-2,42	-3,75	-2,09	1,64
B	Pertambangan dan Penggalian	7,72	3,83	21,34	18,17	6,38
C	Industri Pengolahan	-3,52	-2,66	-2,62	1,07	3,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,61	19,70	4,36	10,28	13,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,40	13,38	5,14	7,45	2,79
F	Konstruksi	-0,19	8,99	8,90	10,50	-1,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,50	5,10	6,45	7,37	2,49
H	Transportasi dan Pergudangan	33,65	2,62	0,14	5,12	1,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,95	2,48	5,75	11,82	2,38
J	Informasi dan Komunikasi	1,65	9,17	-11,46	-5,83	2,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,28	7,17	9,08	-0,50	11,64
L	Real Estat	2,58	13,05	2,59	4,58	2,27
M,N	Jasa Perusahaan	20,76	12,79	-5,65	5,17	0,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,03	9,54	12,52	-17,90	-5,15
P	Jasa Pendidikan	6,67	22,06	9,25	14,81	7,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,78	18,24	-10,54	-4,93	2,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,60	15,43	-0,60	3,68	6,88
PDRB		3,97	4,23	11,55	9,26	3,43

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2016.

Struktur ekonomi Kabupaten Malinau saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian, pertambangan dan penggalian dengan total sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Malinau secara rata-rata lebih dari 50 persen. Sumbangan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB mengalami

penurunan, sementara sumbangan sub sektor pertambangan batu bara dalam tiga tahun terakhir ini meningkat. Ketergantungan pada pertambangan dan penggalian sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batu bara di pasar internasional. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Tabel 2.5
Struktur Ekonomi Kabupaten Malinau Tahun 2011– 2015 (%)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,33	15,77	13,94	13,19	12,91
B	Pertambangan dan Penggalian	47,22	42,26	45,05	47,17	47,86
C	Industri Pengolahan	3,16	3,20	2,97	2,98	3,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	13,11	15,49	15,15	15,69	15,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,51	3,67	3,60	3,72	3,70
H	Transportasi dan Pergudangan	3,35	3,53	3,22	3,24	3,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43	1,58	1,63	1,66	1,73
J	Informasi dan Komunikasi	0,43	0,48	0,34	0,34	0,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	0,19	0,20	0,20	0,21
L	Real Estat	0,22	0,27	0,26	0,25	0,26
M,N	Jasa Perusahaan	0,17	0,20	0,17	0,18	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,24	10,06	10,49	8,08	7,32
P	Jasa Pendidikan	1,36	1,67	1,65	1,99	2,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,47	1,19	1,16	1,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2016

Selama tahun 2011-2015 sumbangan kegiatan konstruksi, perdagangan, transportasi dan akomodasi restoran terus meningkat dari 21,08 persen pada tahun 2011

menjadi 23,14 persen pada tahun 2015. Pergeseran struktur ekonomi menunjukkan adanya perluasan basis kegiatan ekonomi di Kabupaten Malinau. Struktur ekonomi Kabupaten Malinau yang didominasi oleh sektor-sektor yang umumnya lebih padat modal telah mengurangi kemampuan ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor-sektor ekonomi tersebut juga lebih berorientasi jangka pendek sehingga perlu pengembangan sektor-sektor produktif dalam jangka panjang untuk mendorong ekonomi daerah. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah perluasan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, dan pendapatan, serta menciptakan kesempatan kerja baru. Tantangan lainnya dalam pengembangan perekonomian daerah adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat dan perluasan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dengan mengutamakan revitalisasi pertanian.

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia terutama dalam pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Perkembangan IPM Kabupaten Malinau tercatat terus membaik dari 66,90 pada tahun 2010 menjadi 70,15 pada tahun 2015. Demikian pula angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita juga terus mengalami perbaikan. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Malinau selama periode 2010-2015 adalah sebesar 0,65 pertahun. Hal ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan nilai IPM adalah 65 persen per tahun. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah mengingkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan; serta

meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Tabel.2.6

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Pembangunan Manusia	66,90	68,15	68,88	69,84	70,00	70,15
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp)	8.928,30	8.969,13	9.134,82	9.300,50	9.343,04	9.415,13
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,39	13,08	13,12	13,17	13,22	13,23
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,13	7,43	7,75	8,27	8,27	8,29
Angka Melek Huruf (%)	94,29	91,61	92,97	94,11	100	-
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,17	70,40	70,63	70,82	70,93	71,03

Sumber: Disdikpora Kab. Malinau, BPS Kabupaten Malinau. Statistik Kabupaten Malinau 2014, Malinau Dalam Angka 2016.

2. Kemiskinan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di daerah perdesaan dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan terutama Gerakan Desa Membangun telah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 9,60 ribu jiwa pada tahun 2010 menjadi 7,63 ribu jiwa pada tahun 2014 atau menurun sebanyak 3,03 ribu jiwa dalam lima tahun atau 4.900 jiwa pertahun. Persentase penduduk miskin juga menurun dari 15,31 persen pada tahun 2010 menjadi 10,12 persen pada tahun 2010. Pembangunan yang mengutamakan masyarakat desa di Kabupaten Malinau mempunyai dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.

Kemiskinan bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah mendorong pemenuhan

hak-hak dasar rakyat perdesaan terutama dalam hal penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi; mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat; melakukan revitalisasi pertanian; serta mengembangkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

1. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradap. Kabupaten Malinau yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 109 desa, Memiliki beraga etnis dan beragam budaya yang tentunya berdampak terhadap beragamnya kesenian daerah yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dapat dipromosikan sebagai daya tarik dibidang pariwisata.

Pada tahun 2014 terdapat 25 kelompok kesenian musik dan tari di Kabupaten Malinau dengan anggota berjumlah 586 orang. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 38 kelompok dengan anggota 877 orang, hal ini dikarenakan beberapa kelompok musik dan tari yang tidak lagi aktif berkegiatan. Berikut disampaikan data tentang kelompok kesenian serta anggota kelompok kesenian dan sarana gedung Kesenian yang ada di Kabupaten Malinau.

Tabel 2.7
Banyaknya Kelompok Kesenian di Kabupaten Malinau
Tahun 2010-2014

Tahun	Seni Tari	Seni Drama	Seni Musik	Seni Kaligrafi/lukis	Lainnya
2010	16	0	16	0	0
2011	26	0	26	0	0
2012	38	0	38	0	0
2013	38	0	38	0	0
2014	25	0	25	0	0

Sumber : Malinau Dalam angka Tahun 2015

Tabel 2.8
Banyaknya Anggota Kelompok Seni di Kabupaten Malinau
Tahun 2010-2014

Tahun	Seni Tari	Seni Drama	Seni Musik	Seni Kaligrafi/lukis	Lainnya
2010	529	0	529	0	0
2011	628	0	628	0	0
2012	877	0	877	0	0
2013	877	0	877	0	0
2014	586	0	586	0	0

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2.9
Banyaknya Sarana Gedung/Tempat Kesenian di Kabupaten Malinau
Tahun 2010-2014

Tahun	Seni Tari	Seni Drama	Seni Musik	Seni Kaligrafi/lukis	Lainnya
2010	33	0	0	0	0
2011	33	0	0	0	0
2012	33	0	0	0	0
2013	33	0	0	0	0
2014	33	0	0	0	0

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2015

2. Pemuda dan Olah Raga

Untuk Mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga. berikut ini disajikan data tentang banyaknya Kelompok olahraga, Banyaknya Anggota/Atlit Olahraga dan sarana gedung Olahraga menurut Kecamatan serta jenis Olahraganya.

Tabel 2.10
Banyaknya Kelompok/Klub Olahraga di Kabupaten Malinau
Tahun 2012

No	Wilayah pengembangan/ Kecamatan	Jenis Olahraga			
		Sepak bola	Bola Voly	Tenis Lapangan	Bulu Tangkis
1	Kayan Hulu	1	2	-	1
2	Sungai Boh	1	2	-	1
3	Kayan selatan	1	2	-	1
4	Kayan Hilir	1	2	-	1
5	Pujungan	1	2	-	1
6	Bahau Hulu	1	2	-	1
7	Malinau Kota	6	8	2	8
8	Malinau Selatan ¹	2	4	-	2
9	Malinau Barat	4	4	1	6
10	Malinau Utara	3	4	-	4
11	Mentarang ²	4	6	-	4
12	Mentarang Hulu	2	2	-	-
Jumlah		27	40	3	31

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2015

¹ termasuk Kecamatan Malinau selatan Hulu dan Malinau Selatan Hilir

² teramsuk Kecamatan Sungai Tubu

Tabel 2.11
Banyaknya Anggota/Atlit Olahraga di Kabupaten Malinau
Tahun 2012

No	Wilayah pengembangan/ Kecamatan	Jenis Olahraga			
		Sepak bola	Bola Voly	Tenis Lapangan	Bulu Tangkis
1	Kayan Hulu	20	18	-	5
2	Sungai Boh	20	18	-	5
3	Kayan selatan	20	18	-	5
4	Kayan Hilir	20	18	-	5
5	Pujungan	20	18	-	5
6	Bahau Hulu	20	18	-	5
7	Malinau Kota	120	72	10	40
8	Malinau Selatan ¹	40	36	-	10
9	Malinau Barat	80	36	1	30
10	Malinau Utara	60	36	-	20
11	Mentarang ²	80	54	-	20
12	Mentarang Hulu	40	18	-	5
Jumlah		540	360	11	155

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2015

¹ termasuk Kecamatan Malinau selatan Hulu dan Malinau Selatan Hilir

² teramsuk Kecamatan Sungai Tubu

Tabel 2.12
Banyaknya Sarana Gedung/Tempat/Lapangan Olahraga
Dan jenis olah raga di Kabupaten Malinau
Tahun 2012

No	Wilayah pengembangan/ Kecamatan	Jenis Olahraga				
		Sepak bola	Bola Voly	Tenis Lapangan	Bulu Tangkis	Lainnya
1	Kayan Hulu	-	-	-	-	
2	Sungai Boh	-	-	-	-	
3	Kayan selatan	-	-	-	-	
4	Kayan Hilir	-	-	-	-	
5	Pujungan	-	-	-	-	
6	Bahau Hulu	-				
7	Malinau Kota	2	6	2	1	4
8	Malinau Selatan ¹					
9	Malinau Barat	3	8		1	4
10	Malinau Utara	3	4	1	1	4
11	Mentarang ²	3	5	-	1	3
12	Mentarang Hulu	-	-	-	-	-
Jumlah		11	23	3	4	15

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2015

¹ termasuk Kecamatan Malinau selatan Hulu dan Malinau Selatan Hilir

² teramsuk Kecamatan Sungai Tubu

Dari data fasilitasi olahraga baik jumlah Klub/kelompok olahraga yang ada dan gedung olahraga yang tersedia sebagaimana terlihat dalam tabel diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah tetap memperhatikan keberlangsungan klub-klub olah raga yang ada di Kabupaten Malinau Meskipun tampak data yang tersedia diatas tidak menampillan secara Keseluruhan karena keterbatasan data yang ada namun dalam meningkatkan bidang Kebudayaan dan Olahraga perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Kabaupaten Malinau Lima Tahun mendatang.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pengembangan pendidikan yang merata, terjangkau dan bermutu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan produktivitas daerah. Peningkatan pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh penyediaan gedung sekolah, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, pembinaan tenaga pengajar, dan penyediaan buku dan peralatan sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk menurut kelompok umur jenjang pendidikan dikalikan 100, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) jumlah siswa setiap jenjang pendidikan

menurut kelompok umur usia sekolah dibagi jumlah penduduk menurut kelompok umur jenjang pendidikan dikalikan 100.

Angka partisipasi untuk jenjang pendidikan SD/Mi di Kabupaten Malinau baik diukur dengan APK, APM maupun APS termasuk tinggi atau lebih dari 96 persen. Sementara APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA tercatat rendah atau kurang dari 77 persen. Kondisi ini menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Tantangan yang harus diatasi pada lima tahun mendatang adalah perluasan jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau.

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2015

Jenjang Pendidikan	APK	APM	APS
SD/MI (7-12 tahun)	107,14	96,25	99,30
SMP MTs (13-15 tahun)	97,58	76,69	90,66
SMA/SMK/MA (16-18 tahun)	85,76	60,34	73,02

Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2015

Perluasana jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. atau Sampai tahun 2015 jumlah murid di Kabupaten Malinau untuk jenjang SD/MI tercatat sebanyak 10.224 siswa, SMP/MTs sebanyak 4.122 siswa dan SMA/SMK/MA sebanyak 2.644 siswa. Ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dan juga meningkatkan jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

Tabel 2.14
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2015

Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1. Sungai Boh	5	351	36	2	222	25	1	70	0
2. Kayan Selatan	4	280	36	1	116	14	1	82	0
3. Kayan Hulu	5	195	31	1	127	12	1	92	0
4. Kayan Hilir	3	193	33	2	130	19	1	18	5
5. Pujungan	8	231	46	1	56	8	1	42	10
6. Bahau Hulu	6	207	36	1	89	7	1	12	0
7. Sungai Tubu	4	173	27	1	46	-	1	-	-
8. Malinau Selatan Hulu	5	551	564	2	133	30	0	0	-
9. Malinau Selatan	4	640	56	1	120	25	1	139	22
10. Malinau Selatan Hilir	7	690	78	3	414	48	0	0	0
11. Mentarang	6	899	80	3	363	19	3	202	10
12. Mentarang Hulu	7	204	59	1	71	14	1	17	15
13. Malinau Utara	17	1.988	206	4	751	71	2	420	24
14. Malinau Barat	12	1.535	109	4	390	60	3	385	8
15. Malinau Kota	13	2.087	188	4	1.094	272	4	1.165	46
Jumlah	106	10.224	1.585	31	4.122	624	29	2.644	140

Sumber: Malinau Dalam Angka Kabupaten Malinau Tahun 2016

Perkembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Malinau ditunjukkan oleh jumlah mahasiswa dan lulusan politeknik Kabupaten Malinau. Data menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa dan lulusan Politeknik Malinau rata-rata di atas 500 orang. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan politeknik dan membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Malinau.

Tabel 2.15
Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Politeknik di Kabupaten Malinau 2010-2015

Tahun	Mahasiswa			Lulusan/Wisudawan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2015	215	293	508	29	64	93
2014	436	451	887	73	47	130
2013	331	341	672	99	82	181
2012	255	291	546	109	138	247
2011	382	383	765	0	0	0
2010	495	413	908	0	0	0

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2016

Tingkat kelulusan merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan pendidikan. Tingkat kelulusan di Kabupaten Malinau pada tahun 2015 mencapai 99,58 persen dengan rincian angka kelulusan tingkat pendidikan dasar, 99,29 persen untuk tingkat pendidikan menengah dan 93,86 persen untuk tingkat pendidikan atas. Tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan angka kelulusan dan memperluas kesempatan bagi siswa untuk menlanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan yang baik, merata dan bermutu merupakan hak dasar rakyat dan sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Status kesehatan masyarakat dapat menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan suatu daerah dalam usaha pemenuhan hak dasar rakyat. Manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan modal utama dalam pembangunan.

Pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah; serta mendorong kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Selain itu, derajat kesehatan masyarakat juga sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan dan gizi; serta perbaikan prasarana dan sarana sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

Prasarana dan sarana kesehatan yang tersedia pada tahun 2015 di Kabupaten Malinau adalah Rumah Sakit sebanyak 2 unit, Puskesmas sebanyak 14 unit, Puskesmas Pembantu 68 unit, Posyandu 110 unit dan klinik/balai kesehatan sebanyak 1 unit. Jumlah prasarana dan sarana kesehatan masih terbatas karena dua kecamatan belum ada Puskesmas dan Posyandu. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah pembangunan prasarana dan sarana kesehatan, revitalisasi Puskesmas dan Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa; serta peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2015 tercatat sebanyak 470 orang terdiri dari dokter umum 42 orang, perawat 221 orang, bidang 182 orang, tenaga farmasi 9 orang dan ahli gizi 16 orang. Selain itu jumlah dokter spesialis sebanyak 15 orang dan okter gigi sebanyak 12 orang. Jumlah tenaga kesehatan tersebut masih jauh dari memadai untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah penambahan dokter khususnya dokter umum dan dokter spesialis, tenaga farmasi dan ahli gizi.

Tabel 2.16
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2015

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan
1. Sungai Boh	0	1	3	0	0
2. Kayan Selatan	0	1	3	5	0
3. Kayan Hulu	0	1	4	8	0
4. Kayan Hilir	0	1	2	6	0
5. Pujungan	0	1	4	4	0
6. Bahau Hulu	0	1	5	7	0
7. Sungai Tubu	0	0	4	2	0
8. Malinau Selatan Hulu	0	0	5	7	0
9. Malinau Selatan	1	1	3	9	0
10. Malinau Selatan Hilir	0	2	5	10	0
11. Mentarang	0	1	6	12	0
12. Mentarang Hulu	0	1	7	8	0

13. Malinau Utara	1	1	8	15	0
14. Malinau Barat	0	1	6	10	0
15. Malinau Kota	0	1	3	11	1
Jumlah	2	14	68	110	1

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.17
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2015

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Ahli Gizi
1. Sungai Boh	2	12	12	1	1
2. Kayan Selatan	4	12	9	0	2
3. Kayan Hulu	1	10	11	0	1
4. Kayan Hilir	3	15	10	0	0
5. Pujungan	0	0	0	0	0
6. Bahau Hulu	1	12	11	0	1
7. Sungai Tubu	0	0	0	0	0
8. Malinau Selatan Hulu	0	0	0	0	0
9. Malinau Selatan	7	16	18	0	2
10. Malinau Selatan Hilir	5	39	23	1	3
11. Mentarang	4	37	22	2	0
12. Mentarang Hulu	2	4	10	0	1
13. Malinau Utara	4	16	26	2	1
14. Malinau Barat	5	25	18	2	3
15. Malinau Kota	4	23	12	1	1
Jumlah	42	221	182	9	16

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2016

2.2 Prasarana dan Sarana Daerah

2.2.1. Transportasi

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang baik antardesa, antarkecamatan antarkabupaten dan antarnegara. Transportasi yang baik, lancar, mudah dan murah akan mendukung penghematan pengeluaran rumah tangga, pemanfaatan keunggulan komparatif desa dan daerah, serta peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Transportasi yang baik juga akan mendukung berkembangnya kegiatan sosial budaya masyarakat dan mendorong kemajuan daerah secara lebih cepat.

Transportasi di Kabupaten Malinau mencakup pengembangan transportasi darat, laut dan udara. Sampai dengan tahun 2015, panjang jalan di Kabupaten Malinau pada tahun 2015 mencapai 1.640,49 km, terdiri dari 255 km jalan negara, 247,10 km jalan provinsi, dan 1.138,39 km jalan kabupaten. Dari panjang jalan kabupaten tersebut 180,68 km kondisinya telah diaspal, 311,57 km kerikil, dan 646,14 km masih tanah. Jalan beraspal masih relatif sedikit dibanding keseluruhan panjang jalan. Sebagian besar jenis jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antardesa dan antarkecamatan. Selain itu, jalan negara dan jalan provinsi tidak bertambah selama lima tahun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan khususnya yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi darat berupa jalan di Kabupaten Malinau sebagian besar masih berupa jalan tanah. Pada tahun 2015 hampir sebagian besar jalan negara terdiri dari jalan tanah. Jalan provinsi yang diaspal kurang lebih hanya 25 persen. Sedangkan jalan kabupaten yang sudah diaspal mencapai sekitar 40 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses transportasi darat di Kabupaten Malinau masih sangat kurang sehingga menyebabkan desa di daerah pedalaman dan perbatasan menjadi terisolasi. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah memperluas akses jalan terutama di daerah pedalaman dan perbatasan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan barang, membuka keterisolasi dan mempercepat kemajuan desa.

Dari kondisi jalan yang ada di Kabupaten Malinau sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan barang, meningkatkan biaya tinggi, menambah beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi potensi pengembangan daerah. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah memelihara dan meningkatkan kondisi jalan menjadi baik untuk mendorong percepatan kemajuan pembangunan desa di Kabupaten Malinau.

Sementara, jumlah kendaraan di Kabupaten Malinau terus meningkat setiap tahun dan jenisnya didominasi oleh sepeda motor. Pada tahun 2015 terdapat 17.033 unit sepeda motor. Mobil barang merupakan jenis kendaraan terbanyak kedua dengan jumlah 1.611 unit lalu kemudian disusul oleh mobil penumpang sebanyak 1.336 unit. Tantangan yang harus diatasi adalah pembangunan jalan, penataan lalu lintas dan penyediaan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 2.18
Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan di Kabupaten Malinau
2011-2015 (km)

Jenis Jalan	2011	2012	2013	2014	2015
1. Jalan Negara	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
2. Jalan Provinsi	247,10	247,10	247,10	247,10	247,10
3. Jalan Kabupaten	603,88	603,88	965,89	1.138,39	1.339,20
Jumlah	1.053,75	1.105,98	1.467,99	1.640,49	1.841,20

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.19
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Malinau 2015 (km)

Jenis Permukaan	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Diaspal	15,00	50,00	211,28	276,28
Kerikil	0,00	45,00	334,42	379,42
Tanah	240,00	84,10	793,40	1.117,50
Lainnya	0,00	68,00	0,00	68,00
Jumlah	255,00	247,10	1.339,10	1.841,20

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.20
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Malinau 2015 (km)

Jenis Permukaan	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Baik	15,00	50,00	211,28	276,28
Sedang	0,00	45,00	334,42	379,42
Rusak	240,00	84,10	793,40	1.117,50
Rusak Berat	0,00	68,00	0,00	68,00
Jumlah	255,00	247,10	1.339,10	1.841,20

Sumber: Malinau Dalam Angka Tahun 2016

Dari segi intensitas transportasi udara, jumlah penerbangan dan jumlah penumpang meningkat secara nyata. Pada tahun 2015 jumlah penerbangan tercatat 2.818 penerbangan kedatangan dan 3.035 penerbangan keberangkatan dengan jumlah penumpang yang datang sebanyak 28.602 orang dan yang berangkat 30.353 orang. Data tersebut menunjukkan semakin tingginya mobilitas penduduk dan angkutan barang antardaerah di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi adalah peningkatan dan perluasan lapangan terbang perintis; serta peningkatan jangkauan dan perluasan jalur penerbangan terutama menuju desa-desa dan kecamatan-kecamatan di daerah pedalaman dan perbatasan.

Sementara itu penduduk yang memanfaatkan transportasi air terus meningkat. Pada tahun 2015 tercatat kapal tambat di dermaga Malinau sebanyak 1.318 kali dengan jumlah penumpang yang naik sebanyak 80.109 orang dan yang turun sebanyak 74.452 orang. Pemanfaatan transportasi barang juga meningkat. Jumlah barang yang dimuat tercatat 10.695 ton dan barang yang dibongkar tercatat 51.202 ton. Dengan kata lain, impor barang dari daerah lain masuk ke Kabupaten Malinau relatif sangat besar. Tantangan yang harus diatasi adalah pengembangan produksi dan produktivitas barang yang dihasilkan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

2.2.2. Telekomunikasi

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Pengembangan telekomunikasi dan informasi ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi; keterpaduan sistem telekomunikasi dan informasi; serta keterjangkauan jaringan telekomunikasi dan informasi secara merata, murah, mudah dan cepat.

Kemajuan pengembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau menunjukkan peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2015 di Kabupaten Malinau berdiri 3 operator handphone dan melayani wilayah kota dan kecamatan dan desa. Persentase rumah tangga menurut kepemilikan telepon relatif sedikit atau kurang dari 6 persen, sedangkan persentase rumah tangga yang memilii telpon seluler lebih dari 70 persen. Rumah tangga yang memiliki PC komputer dan lap top masih terbatas. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah perluasan jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

Tabel 2.21
Persentase Rumah tangga Menurut Kepemilikan Telepon Seluler, PC Komputer dan Laptop
Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Telepon	8,49	5,49	0	5,33
Telepon Seluler	84,59	71,95	77,22	83,02
PC Komputer	6,86	4,35	0,57	3,78
Laptop	14,67	16,61	0,87	23,17

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2016

2.2.3 Air Minum

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Penyediaan air bersih sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber air baku, pemeliharaan dan pembangunan jaringan distribusi air sampai ke desa dan kecamatan.

Perkembangan rumah tangga menurut sumber air minum menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan air ledeng dalam periode 2011-2013 cenderung menurun dan meningkat, sedangkan persentase rumah tangga pengguna sumur/mata air tak terlindung, sungai, air hujan dan lainnya cenderung menurun dari 30,31 persen pada tahun 2010 menjadi 23,61 persen pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses air bersih. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah penyediaan air bersih bagi rumah tangga yang murah dan terjangkau terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

**Tabel 2.22
Percentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum
di Kabupaten Malinau 2010-2013 (%)**

Sumber Air Minum	2010	2011	2012	2013
1. Air Ledeng	42,07	28,28	21,62	31,84
2. Air Kemasan/Isi Ulang	8,67	13,66	20,58	12,83
3. Sumur/Mata Air Terlindung	18,94	20,21	27,84	31,72
4. Sumur/Mata Air Tak Terlindung, Sungai, Air Hujan dan Lainnya	30,31	37,85	29,96	23,61

Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional

Jumlah pelanggan air PDAM pada tahun 2013 terus meningkat dibanding tahun 2010. Pelanggan terbanyak adalah rumah tangga dan instansi pemerintah sebanyak 89,72 persen, serta hotel dan restoran sebanyak 9,35 persen. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, menjaga

daya dukung lingkungan sebagai sumber air baku, serta membangun dan memperluas jaringan penyediaan air bersih untuk menjangkau seluruh desa.

Tabel 2.23
Jumlah Pelanggan Air Minum Menurut Kategori
di Kabupaten Malinau 2010-2013 (%)

Sumber Air Minum	2010	2011	2012	2013
1. Rumah Tangga dan Instansi/Kantor Pemerintah	3.701	3.742	4.345	4.810
2. Hotel, Toko dan Industri, Perusahaan	289	358	439	501
3. Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah dan lainnya	37	42	42	42
4. Sarana Umum	3	4	9	8

Sumber: PDAM Kabupaten Malinau

2.2.4 Listrik

Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Produksi listrik di Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2013 terus meningkat hingga mencapai 40.744,00 Mwh atau meningkat hampir 75 persen dibanding tahun 2010. Pengguna utama listrik adalah rumah tangga yang mencapai lebih dari 60 persen. Jumlah pelanggan dari kalangan rumah tangga juga terus meningkat.

Tabel 2.24
Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi dan Terjual Menurut Pelanggan di Kabupaten Malinau 2010-2013 (dalam Mwh)

Pelanggan	2010	2011	2012	2013
Diproduksi	24.155,97	25.037,00	29.680,00	40.744,00
Terjual	21.428,61	21.892,13	27.669,00	27.931,00
1. Rumah Tangga	12.912,00			
2. Usaha	2.640,00			
3. Industri	885,00			
4. Sosial	1.013,00			
5. Publik	3.928,00			

Sumber: PT PLN Cabang Malinau

Tabel 2.25
Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Malinau 2010-2013

Pelanggan	2010	2011	2012	2013
1. Rumah Tangga	3.896	4.515	6.656	7.469
2. Usaha	559	562	659	696
3. Industri	4	4	4	4
4. Sosial	158	170	356	841
5. Publik	123	127	139	183

Sumber: PT PLN Cabang Malinau

Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah perluasan jangkauan pelayanan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

2.3 Evaluasi Pembangunan Kabupaten Malinau

Tahun 2017 merupakan Tahap Pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) sebagaimana yang telah tertuang dalam penjabaran Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta perkembangan pembangunan dewasa ini maka visi Kabupaten Malinau periode 2016-2021 adalah “ **Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun**”.

Guna mencapai visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan 12 (duabelas) misi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: *“one village one product”* dengan semboyan “Bertani Sehat”;
6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”;
9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;

11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

2.3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2016

2.3.1.1. Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Tahun 2016

Evaluasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah terhadap Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan penilaian, tolak ukur capaian Kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Berikut adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 51 (Lima Puluh satu) SKPD untuk Urusan Wajib dan 5 (lima) SKPD Untuk Urusan Pilihan pada tahun 2016 (Terlampir).

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.4.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan

Permasalahan pembangunan di daerah Kabupaten yang menjadi isu strategis:

- a. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, sumber daya dan lingkungan hidup;

- b. Terbatasnya akses dan mutu layanan pendidikan yang antara lain dipengaruhi oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
- c. Rendahnya akses dan mutu layanan kesehatan sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan di daerah perdesaan, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Malinau yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, terbatasnya prasarana pelabuhan dan terbatasnya industri pengolahan hasil perikanan;
- e. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Malinau yang disebabkan oleh belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder yang menghubungkan antarkecamatan; terbatasnya transportasi dalam menghubungkan antarkecamatan dan antardesa; terbatasnya transportasi udara yang ditandai oleh masih sedikitnya jumlah dan jalur penerbangan pesawat, mahalnya biaya untuk setiap penerbangan, dan masih kecilnya kapasitas bandara yang hanya dapat melayani jenis pesawat tertentu saja; serta belum adanya

keterpaduan sistem transportasi antara darat-sungai-udara yang menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Malinau;

- f. Rendahnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
- g. Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai akibat belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antardaerah;
- h. Belum optimalnya layanan di bidang hukum dan pemerintahan terutama dalam memberikan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
- i. Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi lemahnya; dan belum optimalnya sinergi pemerintah kabupaten dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi;
- j. Belum optimalnya pengaturan Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan serta Perdesaan berbasis potensi lokal yang mengakibatkan timbulnya konflik dan kesalahan tata guna lahan;
- k. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan;

1. Lemahnya koordinasi antar SKPD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah;
- m. Belum optimalnya penegakan disiplin dan peningkatan kinerja birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap mengedepankan prinsip responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

RANCANGAN EKONOMI KABUPATEN MALINAU

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Malinau selama kurun waktu 2010-2015 cenderung terus meningkat. Pada tahun 2011, nilai PDRB Kabupaten Malinau sebesar Rp.5.433,27 miliar meningkat menjadi Rp.6.842,38 miliar pada tahun 2015. Kenaikan yang cukup besar ini dipicu oleh peningkatan nilai tambah dari kegiatan primer, yaitu pertambangan dan penggalian terutama pertambangan batu bara, konstruksi, dan pertanian. Peningkatan nilai PDRB menunjukkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi di Kabupaten Malinau.

Tabel 3.1
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Malinau tahun 2011-2015 (Rp. Miliar)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	887,50	858,69	851,10	861,49	883,18
B	Pertambangan dan Penggalian	2.565,85	2.301,15	2.750,37	3.081,06	3.274,95
C	Industri Pengolahan	171,42	174,07	181,60	194,68	211,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,18	1,35	1,35	1,43	2,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,11	3,54	3,67	3,98	4,20
F	Konstruksi	712,38	843,30	924,74	1.025,05	1.064,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190,72	199,88	219,81	243,01	253,49
H	Transportasi dan Pergudangan	182,10	192,41	196,76	211,53	219,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	77,70	86,25	99,43	108,73	118,61
J	Informasi dan Komunikasi	23,33	26,24	20,85	22,35	23,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,09	10,55	11,91	12,78	14,61

L	Real Estat	11,91	14,80	15,95	16,02	17,59
M,N	Jasa Perusahaan	9,17	10,97	10,40	11,97	12,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	447,94	547,60	640,66	528,08	501,17
P	Jasa Pendidikan	74,16	90,76	100,57	129,76	159,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	62,70	80,10	72,71	75,79	77,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,01	3,51	3,65	3,94	4,22
PDRB		5.433,27	5.445,17	6.105,53	6.531,64	6.842,38

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2016.

Sementara nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 juga terus meningkat dari Rp. 4.894,69 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp.6.431,01 miliar pada tahun 2015 sehingga pertumbuhan ekonomi selama tahun 2011-2015 tercatat sebesar 6,49 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh perkembangan sektor perdagangan dan sektor pengangkutan yang memberi andil cukup besar dalam memacu pertumbuhan.

Tabel 3.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Malinau tahun 2011-2015 (Rp. Miliar)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	829,53	809,42	779,02	762,74	775,22
B	Pertambangan dan Penggalian	2.201,31	2.285,53	2.773,31	3.277,29	3.486,33
C	Industri Pengolahan	166,56	162,13	157,87	159,57	164,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,26	1,50	1,57	1,73	1,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,13	3,54	3,73	4,00	4,12
F	Konstruksi	665,63	725,49	790,08	873,04	857,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	185,87	195,35	207,94	223,27	228,84
H	Transportasi dan Pergudangan	174,16	178,72	178,97	188,13	191,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	75,11	76,97	81,39	91,01	93,18
J	Informasi dan Komunikasi	23,06	25,18	22,29	20,99	21,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,59	9,21	10,05	10,00	11,16
L	Real Estat	11,27	12,74	13,07	13,66	13,97

M,N	Jasa Perusahaan	8,62	9,72	9,17	9,65	9,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	409,28	448,32	504,46	414,17	392,83
P	Jasa Pendidikan	68,68	83,83	91,58	105,15	113,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59,96	70,90	63,43	60,30	61,57
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,69	3,10	3,08	3,20	3,42
PDRB		4.894,69	5.101,64	5.691,02	6.217,90	431,01

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2016.

Perubahan tahun dasar penghitungan nilai PDRB menyebabkan terjadinya perubahan dalam penghitungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau. Data BPS menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 3,97 persen kemudian meningkat menjadi 11,55 persen pada tahun 2013 yang merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar sejak terbentuknya Kabupaten Malinau. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan nilai tambah sektor pertambangan dan perkebunan, serta sektor sekunder dari sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Dalam dua tahun terakhir, penurunan permintaan komoditas pertambangan dan perkebunan membawa dampak terjadinya penurunan produksi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah percepatan dan pemulihan ekonomi daerah dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan melalui optimalisasi pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, mengoptimalkan program dan kegiatan dari seluruh SKPD, dan mengembangkan kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015 (%)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-8,19	-2,42	- 3,75	-2,09	1,64
B	Pertambangan dan Penggalian	7,72	3,83	21,3 4	18,17	6,38
C	Industri Pengolahan	-3,52	-2,66	- 2,62	1,07	3,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,61	19,70	4,36	10,28	13,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,40	13,38	5,14	7,45	2,79
F	Konstruksi	-0,19	8,99	8,90	10,50	-1,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,50	5,10	6,45	7,37	2,49
H	Transportasi dan Pergudangan	33,65	2,62	0,14	5,12	1,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,95	2,48	5,75	11,82	2,38
J	Informasi dan Komunikasi	1,65	9,17	- 11,46	-5,83	2,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,28	7,17	9,08	-0,50	11,64
L	Real Estat	2,58	13,05	2,59	4,58	2,27
M,N	Jasa Perusahaan	20,76	12,79	- 5,65	5,17	0,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,03	9,54	12,5 2	-17,90	-5,15
P	Jasa Pendidikan	6,67	22,06	9,25	14,81	7,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,78	18,24	- 10,54	-4,93	2,11
R,S,T, U	Jasa lainnya	7,60	15,43	- 0,60	3,68	6,88
PDRB		3,97	4,23	11, 55	9,26	3,43

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2016.

Struktur ekonomi Kabupaten Malinau saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian, pertambangan dan penggalian dengan total sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Malinau secara rata-rata lebih dari 50 persen. Sumbangan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan, sementara sumbangan sub sektor pertambangan batu bara dalam tiga tahun terakhir ini meningkat. Ketergantungan pada pertambangan dan penggalian sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batu bara di pasar internasional. Tantangan yang harus

diatasi dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Tabel 3.4
Struktur Ekonomi Kabupaten Malinau Tahun 2011-2015 (%)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,33	15,77	13,94	13,19	12,91
B	Pertambangan dan Penggalian	47,22	42,26	45,05	47,17	47,86
C	Industri Pengolahan	3,16	3,20	2,97	2,98	3,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	13,11	15,49	15,15	15,69	15,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,51	3,67	3,60	3,72	3,70
H	Transportasi dan Pergudangan	3,35	3,53	3,22	3,24	3,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43	1,58	1,63	1,66	1,73
J	Informasi dan Komunikasi	0,43	0,48	0,34	0,34	0,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	0,19	0,20	0,20	0,21
L	Real Estat	0,22	0,27	0,26	0,25	0,26
M,N	Jasa Perusahaan	0,17	0,20	0,17	0,18	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,24	10,06	10,49	8,08	7,32
P	Jasa Pendidikan	1,36	1,67	1,65	1,99	2,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,47	1,19	1,16	1,14
R,S,T, ,U	Jasa lainnya	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
PDRB		100, 00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2016.

Selama tahun 2011-2015 sumbangan kegiatan konstruksi, perdagangan, transportasi dan akomodasi restoran terus meningkat dari 21,08 persen pada tahun 2011 menjadi 23,14 persen pada tahun 2015. Pergeseran struktur ekonomi menunjukkan adanya perluasan basis

kegiatan ekonomi di Kabupaten Malinau. Struktur ekonomi Kabupaten Malinau yang didominasi oleh sektor-sektor yang umumnya lebih padat modal telah mengurangi kemampuan ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor-sektor ekonomi tersebut juga lebih berorientasi jangka pendek sehingga perlu pengembangan sektor-sektor produktif dalam jangka panjang untuk mendorong ekonomi daerah. Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah perluasan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, dan pendapatan, serta menciptakan kesempatan kerja baru. Tantangan lainnya dalam pengembangan perekonomian daerah adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat dan perluasan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dengan mengutamakan revitalisasi pertanian.

3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

3.1.2.1 Tantangan

Sebagai salah satu kabupaten paling luas wilayahnya di Kalimantan Timur, Kabupaten Malinau memiliki peluang – peluang untuk dikembangkan ke depan, mengingat juga letaknya yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, dapat mempercepat globalisasi peningkatan barang, jasa, modal dan informasi lintas daerah dan negara.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 yang mengusung program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) ,

pada tahun 2018 adalah tahapan **memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi)** **pembangunan Kabupaten Malinau terutama peningkatan penyediaan infrastruktur, dan pengembangan UMKMK.** Pada tahap pembangunan ini Kabupaten Malinau diharapkan desa-desa di daerah pedalaman dan daerah perbatasan semakin maju dan berkembang dengan mengandalkan kegiatan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pariwisata daerah dengan pengelolaan secara lebih efisien dan efektif didukung dengan berkembangnya pusat agribisnis dan pusat pariwisata.

Dalam rangka mewujudkan tahapan pemantapan tersebut masih ada tantangan akan dihadapi, tantangan perkembangan globalisasi dimana peningkatan investasi dan percepatan pembangunan yang mendorong eksplorasi sumber daya alam termasuk hutan dan tambang secara berlebihan yang akan berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan.

Arus barang dari luar baik yang dari kabupaten/kota lain dan negara tetangga banyak mendominasi pasar lokal. Hal tersebut berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Malinau. Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Malinau.

Keadaan infrastruktur dasar yang masih terbatas termasuk akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bermutu termasuk perbaikan

gizi terutama di daerah pedalaman dan perbatasan dapat mendorong masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan untuk melakukan migrasi ke negara tetangga. Hal tersebut di dukung oleh infrastruktur dan kondisi kehidupan negara tetangga yang relatif lebih maju dan berkembang serta dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah perbatasan.

3.1.2.2 Prospek

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik setiap tahunnya, terutama di bidang pertanian yang kembali melaju sebesar 6,35 persen, walaupun tidak sebesar laju pertumbuhan ekonomi pertambangan dan penggalian. Potensi pertanian yang cukup besar sebagai landasan penguatan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini harus terus dipacu dengan penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta lembaga peningkatan kegiatan ekonomi yang lebih diarahkan kepada pasar, sehingga hasil pertanian tidak hanya dinikmati sendiri oleh petani tetapi juga menjadi komoditi yang dijual di pasar dengan nilai yang sesuai sehingga memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya petani di Kabupaten Malinau.

Sumberdaya alam besar, khususnya hutan dengan dukungan keragaman hayati, perairan, tambang, dan tempat wisata alam dapat menjadi penunjang peningkatan produktivitas dan daya saing Kabupaten Malinau. Khususnya di bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan

tambahan pendapatan daerah mengingat dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten Malinau masih tergantung dari dana perimbangan.

Peningkatan kegiatan perekonomian di Kabupaten Malinau terlihat dari potensi ekonomi yang dimiliki ditandai dengan tumbuhnya usaha kecil dan menengah dengan keanekaragaman komoditas, dan usaha yang potensial mendatangkan investasi jangka menengah dan jangka panjang.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2018 tentunya memerlukan pembiayaan kegiatan pembangunan yang berasal dari pendapatan daerah. Beberapa Berbagai langkah tersebut secara bertahap diharapkan akan meningkatkan PAD Kabupaten Malinau adalah menumbuhkan potensi pajak, intensifikasi pendataan dan penataan pajak daerah, pemberahan administrasi perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialisasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah penguatan koordinasi antardinas/instansi pemungut retribusi daerah. Hal ini perlu terus di giatkan mengingat struktur PAD dilihat dari tahun – tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pajak daerah bukan menjadi sumber utama. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya transaksi ekonomi yang dapat menumbuhkan potensi pajak, terbatasnya wajib pajak dan belum berkembangnya sistem pengelolaan pajak daerah.

(1) Kebijakan belanja tidak langsung diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas mutu dan nilai tambah dalam pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
- b. Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi SKPD yang memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
- c. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar unit;

(2) Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk:

- a. Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan 2016-2021 dengan melaksanakan Gerakan Desa Membangun secara penuh dan konsisten;
- b. Mendukung penguatan empat pilar pembangunan, yaitu: peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan; pengembangan ekonomi kerakyatan; pembangunan infrastruktur perdesaan; dan pelaksanaan reformasi biorkrasi;
- c. Mendukung terwujudnya tiga komitmen daerah, yaitu revitalisasi pertanian, Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan dan pengembangan pariwisata;

- d. Mendorong percepatan pengembangan ekonomi desa melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan, serta memperkuat usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UMKM);
- e. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pemerataan pembangunan.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.5

REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2011 S/D 2017

NO	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1.1	Pendapatan asli daerah	91,486,422,151.96	112,428,816,954.08	93,877,563,536.93	103,370,977,346.61	71,625,371,866.48	102,248,589,000.00	49,752,891,200.00
1.1.1	Pajak daerah	1,227,601,790.00	3,362,438,034.00	5,012,699,473.00	7,440,658,373	7,632,010,912.0	6,346,000,000.0	7,792,075,000.0
1.1.2	Retribusi daerah	16,700,410,784.00	1,903,589,000.00	1,664,053,163.01	2,082,584,165	1,378,325,594.5	949,000,000.0	1,066,324,000.0
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16,749,378,089.21	8,273,636,391.17	9,347,804,868.42	10,158,332,390	7,473,558,759.1	10,333,000,000.0	4,375,000,000.0
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	56,809,031,488.75	98,889,153,528.91	77,853,006,032.50	83,689,402,440	55,141,476,600.9	84,620,589,000.0	36,519,492,200.0
1.2	Dana perimbangan	1,262,486,639,872.00	1,517,631,275,634.00	1,490,177,924,092.00	1,562,020,716,312.00	991,987,041,175.00	1,100,251,312,000.00	1,157,669,527,050.00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	802,962,683,872.00	910,465,322,634.00	785,978,517,092.00	840,066,357,312	306,312,568,175.00	169,900,000,000.00	193,467,061,050.00
1.2.2	Dana alokasi umum	518,760,056,000.00	557,697,933,000.00	620,970,044,000.00	653,156,829,000	643,965,213,000.00	772,980,483,000.00	785,560,973,000.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	40,763,900,000.00	49,468,020,000.00	83,229,363,000.00	68,797,530,000	41,709,260,000.00	131,436,280,000.00	147,646,000,000.00
1.2.4	Dana Alokasi khusus non fisik						25,934,549,000.00	30,995,493,000.00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	193,209,035,890.00	154,301,584,758.00	205,152,734,426.00	176,177,412,310.00	223,427,679,072.43	229,344,749,000.00	138,717,432,000.00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	61,105,928,000.00	66,765,061,000.00	77,768,792,850.00	74,361,981,975	33,486,153,274.43	23,545,000,000.00	15,925,805,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	49,496,879,720.00	77,274,108,758.00	-	-	50,705,054,000.00	82,059,749,000.00	105,301,627,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**	82,606,228,170.00	10,262,415,000.00	114,855,500,000.00	73,236,400,000	108,620,000,000.00	123,740,000,000.00	17,490,000,000.00
1.3.6	Pendapatan Lainnya			12,520,441,576.00	28,579,030,335	30,616,471,798		
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)		1,647,182,097,913.96	1,784,361,677,346.08	1,789,208,222,054.93	1,841,569,105,990.61	1,287,040,092,113.91	1,431,844,650,000.00	1,346,139,850,250.00

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Anggaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan gambaran anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2018, yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang tentunya memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Sumber Anggaran pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan Undang – undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.

Adapun Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli daerah yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah;
2. Penerimaan Pajak & Bukan Pajak Dana Perimbangan yang meliputi :
 - a. Bagian Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak
 - c. DAU

- d. DAK
- e. Penerimaan dari Provinsi atau Pemerintah
- f. Bantuan Keuangan dari Provinsi
- g. Bantuan Dana Kontijensi

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, diperlukan koordinasi dan sinergi dari unit – unit pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah dalam memungut penerimaan, baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain – lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan perkembangan keuangan daerah Kabupaten Malinau beberapa kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau adalah :

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut :
 - 1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;.
 - 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan mutu, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

- 5) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah, dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten malinau sehingga dapat memberikan layanan yang baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan gedung/asrama/aula tersebut;
 - 7) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil.
- 1) Mengembangkan datadasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - 3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh SKPD dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
3. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam upaya mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan

penerimaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018. Maka Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang –undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam pengelolaan belanja daerah haruslah berlandaskan pada semangat (1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kuantitas dan kualitas pelayanan dan kesejahteraan itu terus semakin baik; (2) mengembangkan kehidupan demokratis, berkeadilan dan pemerataan; (3) memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 3.6

REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH
TAHUN 2011 S/D 2017

NO	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi tahun 2011	Realisasi tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Proyeksi pada Tahun 2017
A	BELANJA							
2.1	Belanja Tidak Langsung							
2.1.1	Belanja Pegawai	262,393,396,654.00	319,984,786,456.00	339,475,813,418.00	362,616,345,403.00	431,619,046,928.80	458,156,732,139.69	435,071,737,760.88
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	25,143,358,300.00	22,001,196,786.00	21,944,312,579.00	21,103,098,843.00	17,832,584,777.00	18,669,013,423.00	7,500,000,000.00
2.1.4	Belanja Hibah	24,123,116,900.80	55,119,802,344.76	101,812,662,123.00	160,135,826,756.64	78,161,680,640.00	51,930,198,870.00	11,166,670,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	38,974,414,381.00	14,260,971,396.00	7,523,647,505.00	4,935,686,850.00	4,988,607,588.00	4,400,000,000.00	1,470,000,000.00
2.1.6	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	18,973,542,500.00	120,075,290,000.00	131,175,826,074.00	141,752,550,563.00	238,715,446,846.00	204,399,999,577.00	259,961,627,000.00
2.1.7	Belanja tidak terduga	27,000,000.00	357,564,000.00	357,564,000.00	-	99,636,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
B.	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	369,634,828,735.80	531,799,610,982.76	602,289,825,699.00	690,543,508,415.64	771,417,002,779.80	738,555,944,009.69	716,170,034,760.88
2.2	Belanja Langsung							
2.2.1	Belanja pegawai	57,958,547,210.00	85,052,661,038.00	100,021,607,622.00	102,957,410,711.00	109,885,140,050.00	97,243,846,800.00	93,757,551,120.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	304,787,436,120.00	413,250,673,653.00	450,783,159,325.00	429,466,272,454.00	275,824,337,619.85	379,963,892,746.00	206,290,969,754.83
2.2.3	Belanja Modal	505,551,174,304.82	521,158,089,858.00	986,092,557,957.10	862,540,411,342.43	483,310,582,124.00	613,928,025,931.17	523,646,974,025.77
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	868,297,157,634.82	1,019,461,424,549.00	1,536,897,324,904.10	1,394,964,094,507.43	869,020,059,793.85	1,091,135,765,477.17	823,695,494,900.60
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1,237,931,986,370.62	1,551,261,035,531.76	2,139,187,150,603.10	2,085,507,602,923.07	1,640,437,062,573.65	1,829,691,709,486.86	1,539,865,529,661.48

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan Tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, penerimaan pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan. Untuk Tahun 2018 , struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja.

Tabel 3.7

**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2011 s/d 2017**

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah						
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi tahun 2014	Realisasi tahun 2015	Target tahun 2016	Proyeksi /Target Pada Tahun 2017
3.1	Penerimaan pembiayaan							
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	392,040,683,660	779,983,214,236	981,314,023,396	617,598,957,262	373,242,329,329	399,347,059,487	30,666,485,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	29,208,614,850	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	163,059,194,411
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah			-	1,081,869,000	1,029,801,400,000	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		392,040,683,660	809,191,829,086	981,314,023,396	618,580,826,262	374,272,130,729	399,347,059,487	193,725,679,411
3.2	Pengeluaran pembiayaan							
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	10,645,000,000	15,000,000,000	13,778,500,000	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	690,337,400	885,000,000	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	0%	2,061,000,000	1,500,000,000	500,000,000	1,500,000,000	-
	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	26,450,000	0%	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		11,361,787,400	15,885,000,000	15,839,500,000	1,500,000,000	500,000,000	1,500,000,000	-

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016 masih mengacu pada RPJMD tahun 2016 -2021 dengan tujuan sasaran pembangunan sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kesatu

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kesatu: **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;** dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kelima dan keenam dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) dan mendukung Misi pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 ,adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesatu
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1.1 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah 1.2 Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah	<ul style="list-style-type: none">•APS SD/MI•APS SMP/MTs•APS SMA/MA dan SMK•APM SD/MI•APM SMP/MTs•APM SMA/MA dan SMK•Harapan Lama Sekolah•Rata-rata Lama Sekolah•Angka melek huruf <ul style="list-style-type: none">•Angka kelulusan SD/MI•Angka kelulusan SMP/MTs•Angka kelulusan SMA/MA/SMK

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	1.3 Meningkatnya lulusan perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penduduk lulus diploma dan sarjana
	1.4 Meningkatnya minat baca masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengunjung perpustakaan
	2.1 Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kematian Bayi • Jumlah Kematian Balita • Angka kesakitan • Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi • Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan
	2.2 Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka harapan hidup • Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD
	2.3 Meningkatkan status gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk) • Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk
	2.4 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kematian kematian ibu melahirkan • Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih • Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur
	2.5 Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi HIV/AIDS • Prevalensi merokok penduduk usia kurang dari 18 tahun
	2.6 Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
	2.7 Meningkatnya perlindungan dan pengawasan makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan tempat pengelolaan makan (TPM) memenuhi syarat hygiene sanitasi
	2.8 Meningkatnya promosi kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah RT kategori sehat per desa
3. Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas tenaga kerja	3.1 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani dan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase petani terampil • Persentase tenaga kerja terampil
	3.2 Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kasus kecelakaan tenaga kerja
	3.3 Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi terapan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengurus Pos Pelayanan Teknologi (Posyan-tek) yang aktif

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kedua

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kedua: **Meningkatkan peranserta dan**

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu, ketiga dan ketujuhdari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu dan kesepuluh serta mendukung Misi Kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kedua
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	4.1 Menurunnya kemiskinan di perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Persen-tase penduduk miskin
	4.2 Meningkatnya kesempatan kerja di perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengang-guran terbuka
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa	5.1 Berkembangnya organisasi dan lembaga masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Persenta-se masya-rakat yang aktif terlibat dalam organisasi masya-rakat
	5.2 Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Persen-tase usulan masyara-kat desa yang diterima • Persen-tase masya-rakat yang aktif terlibat dalam Musren-bangdesa
	5.3 Terwujudnya kehidupan warga RT yang bersih, tertib, rapi, sehat, indah dan harmonis	<ul style="list-style-type: none"> • Persen-tase pengurus RT yang aktif • Persentase warga RT yang aktif

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Ketiga

Dalam mendukung terwujudnya Misi Ketiga: **Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan,**

perdalam dan perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita ketiga dan keenam dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam, ketujuh, kesembilan dan kesepuluh serta Mendukung Misi Kesatu RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ketiga
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
6. Membuka keterisolasi daerah perdesaan, daerah pedalaman, dan daerah perbatasan	6.1 Tersedianya prasarana dan sarana air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah waduk dan embung dalam kondisi baik • Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik
	6.2 Tersedianya prasarana dan sarana air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase desa dengan akses air bersih • Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
	6.3 Tersedianya prasarana dan sarana listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase desa dengan akses listrik • Persentase rumah tangga dengan akses listrik
	6.4 Tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan desa dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa dengan gedung kantor dan peralatan baik • Jumlah kecamatan dengan gedung kantor dan peralatan baik
7. Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Malinau dengan kabupaten/kota lainnya	7.1 Terbangunnya jaringan transportasi darat	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Jalan Negara yang Kondisi Baik • Persentase Jalan Provinsi yang Kondisi Baik • Persentase Jalan Kabupaten yang Kondisi Baik • Persentase desa dengan akses angkutan darat
	7.2 Terbangunnya jaringan transportasi sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pnum-pang datang • Jumlah pnum-pang berangkat
	7.3 Terbangunnya jaringan transportasi udara	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pnum-pang datang • Jumlah pnum-pang berangkat
	7.4 Terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rumah Tangga yang menggunakan internet • Persentase Rumah Tangga yang menggunakan handphone/telpon

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
8. Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman	8.1 Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase rumah sehat dan layak huni • Persentase rumah tangga dengan jamban sendiri

4.1.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Keempat

Dalam mendukung terwujudnya Misi Keempat: **Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita ketiga, keenam dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kedua, kedelapan, dan kesepuluh serta mendukung misi kesatu RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Keempat
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
9. Mengembangkan lembaga ekonomi perdesaan	9.1 Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM
	9.2 Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan nilai penjualan koperasi dan UMKM • Pertumbuhan nilai pendapatan koperasi dan UMKM
	9.3 Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah BUMDesa yang aktif
10. Mengembangkan pusat-pusat produksi dan	10.1 Berkembangnya perdagangan desa dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pasar • Jumlah toko • Jumlah kios

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		•Jumlah Warung
perdagangan di desa dan kecamatan	10.2 Berkembangnya pusat-pusat kegiatan lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PKL) di setiap kecamatan	•Jumlah hotel •Jumlah Restoran
	10.3 Meningkatnya perdagangan barang dan jasa antara Kabupaten Malinau dan kabupaten/kota lainnya	•Jumlah perusahaan •Jumlah Peda-gang Besar •Jumlah Peda-gang Mene-ngah •Jumlah Peda-gang Kecil dan Mikro

4.1.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kelima

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kelima: **Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita keenam dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kedelapan, kesembilan, dan keduabelas; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kelima
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
11. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya	11.1 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan hasil pertanian	•Pertumbuhan produksi padi (%)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
ikan	tanaman pangan	
	11.2 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan hasil pertanian hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan produk-si sayur-sayuran (%) • Pertumbuhan produk-si Buah-buahan (%)
	11.3 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan hasil perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Produk-si Komo-ditas Perke-bunan (%)
	11.4 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan hasil kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan produk-si Kayu Bulat (%)
	11.5 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan hasil peternakan	Pertumbuhan populasi ternak (%)
		Pertumbuhan populasi Unggas (%)
		Produksi Daging (ton)
		Pertumbuhan produksi Telur (%)
	11.6 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan hasil perikanan	Produksi Ikan (kg)
		<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan Budi-daya • Perikanan Umum
		Pertumbuhan kesempatan kerja pertani-an (%)

4.1.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Keenam

Dalam mendukung terwujudnya Misi Keenam: **Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;** dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita keenam dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang

kesembilan dan kesebelas serta mendukung Misi Kesatu RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Keenam
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
12. Meningkatkan kenyamanan, keindahan dan ketertiban Ibukota Kabupaten Malinau	12.1 Meningkatnya standar dan mutu prasarana dan sarana perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Persen-tase gedung kantor pemerintah daerah dengan kondisi baik
	12.2 Terwujudnya lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Persen-tase wilayah perkota-an yang terlayani sanitasi lingkung-an • Persenta-se wilayah perkota-an yang memiliki sarana pengolahan limbah
	12.3 Terwujudnya lingkungan perkotaan yang nyaman dan indah	<ul style="list-style-type: none"> • Persenta-se kawasan kumuh perkota-an
13. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari ekonomi perkotaan	13.1 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan jasa dan perdagangan	Jumlah pusat perda-gangan
	13.2 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri pengolahan hasil pertanian	Jumlah pusat industri pengolahan hasil pertanian
	13.3 Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri kecil, kerajinan dan rumah tangga	Jumlah pusat-pusat industri kecil, kerajinan dan rumah tangga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
14. Melakukan revitalisasi perusahaan daerah	14.1 Meningkatnya produktivitas perusahaan daerah	Pertumbuhan nilai penjualan perusahaan daerah • Perusda Intimung • Perusda PDAM
	14.2 Meningkatnya efisiensi perusahaan daerah	Pertumbuhan nilai keuntungan perusahaan daerah • Perusda Intimung • Perusda PDAM
15. Mengembangkan kerja investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan	15.1 Meningkatnya penanaman modal daerah	Jumlah usaha investasi
		Nilai usaha investasi (Rp.Miliar)

4.1.7 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Ketujuh

Dalam mendukung terwujudnya Misi Ketujuh: **Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;** dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kedelapan dan kesembilan dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenambelas; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ketujuh
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
16. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	16.1 Meningkatnya ketiaatan masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama	Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan
	16.2 Berkembangnya toleransi dan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	solidaritas antarpemeluk agama	kerjasama antarpemeluk agama
	16.3 Terwujudnya perilaku masyarakat yang didasari norma, etika, dan nilai-nilai keluhuran agama	Angka Kriminalitas (%) Angka penyalahgunaan minuman keras dan narkoba (%)

4.1.8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kedelapan

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kedelapan: **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;** dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kelima dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam, keduabelas, ketigabelas, keempatbelas, dan kelimabelas serta mendukung Misi Kesatu RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kedelapan
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
17. Mengembangkan sikap dan perilaku konservasi	17.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan dan	Pertumbuhan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Persentase masyarakat yang terlibat dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	kelestarian sumber daya alam dan lingkungan	hidup
	17.2 Meningkatnya kemampuan aparat dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan	Persen-tase emisi karbon dari jasa lingkungan dalam mengatasi perubahan lingkungan
	17.3 Terwujudnya kerjasama dan kemitraan dalam pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan	Persen-tase kasus sengke-ta pengelo-aan lingkungan hidup
18. Memantap-kan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan	18.1 Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Tingkat Polusi air Persen-tase kerusakan lahan
	18.2 Terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	Persen-tase penyelesaian kasus perusakan ling-kungan
	18.3 Meningkatnya kewaspada-an, kesiap siagaan, dan mitigasi bencana	Persen-tase penanganan daerah rawan bencana
19. Mengoptimalkan pemanfaat-an dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten	19.1 Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah	Persen-tase ketataan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah
	19.2 Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Persen-tase tanah dengan sertifikat Persen-tase kasus seng-keta tanah

4.1.9 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kesembilan

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kesembilan: **Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu, kedua, dan ketigadari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenambelas; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) dan Misi Kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesembilan
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
20. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan	20.1 Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif	Persen-tase SKPD dengan status laporan kinerja baik
	20.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Status laporan keuangan daerah
	20.3 Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan	Persen-tase SKPD dengan laporan keuangan baik sesuai dengan aturan yang berlaku
	20.4 Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Tingkat keterbu-kaan akses laporan kinerja
21. Meningkatkan kinerja pelayanan publik	21.1 Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, bermutu dan adil	Persenta-se pendu-duk yang memiliki KTP
		Tingkat kepuas-an ma-syarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
22. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang demokratis, bertumpu pada profesionalisme, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kearifan lokal	22.1 Terwujudnya lembaga legislatif, partai politik, dan organisasi masyarakat yang profesional, maju, dan modern 22.2 Terwujudnya tata penyelenggaraan politik dan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel	Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik Persentase masyarakat yang ikut dalam konsultasi publik
	22.3 Terlaksananya pemilu kepala daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Utara, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dan pemilihan kepala daerah Kabupaten Malinau 2021 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada
23. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang damai, aman, tertib, taat hukum, dan harmonis	23.1 Terwujudnya ketertiban dan keamanan	Pertumbuhan kasus tindak kejahatan
	23.2 Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil bertanggung-jawab	Persentase penyelesaian kasus tindak kejahatan

4.1.10 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kesepuluh

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kesepuluh: **Meningkatkan peran pemuda**

dan perempuan dalam pembangunan daerah; dan mendukung terwujudnya Agenda

Pembangunan Nasional Nawacita kelima dan ketujuh dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ketiga, keempat, dan kelima; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesepuluh
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
24. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan desa dan daerah	24.1 Berkembangnya kegiatan kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam olah raga
	24.2 Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya dan olah raga	Jumlah organisasi karang taruna yang terbina
	24.3 Berkembangnya kewira-usahaan para pemuda	Pertumbuhan jumlah wirausaha-muda
25. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa dan daerah menuju kesetaraan dan keadilan jender	25.1 Meningkatnya partisipasi perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PKK yang aktif • Jumlah Posyandu yang aktif
	25.2 Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan	Persentase kasus tindak kekerasan terhadap perempuan
	25.3 Terjaminnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak	Persentase kasus tindak kekerasan terhadap perempuan
	25.4 Terwujudnya keluarga yang sejahtera	Jumlah usaha kelompok perempuan

4.1.11 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Kesebelas

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kesebelas: **Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kelima, kedelapan dan kesembilan dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kedelapan, kesepuluh dan keenambelas, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesebelas
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
26. Mengembangkan modal sosial, seni dan budaya daerah	26.1 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah	Persen-tase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan seni dan budaya daerah
	26.2 Meningkatnya perlindungan dan penghargaan terhadap pelaku dan hasil karya seni dan budaya daerah	Jumlah Pusat seni dan budaya
	26.3 Menguatnya kerjasama, gotong royong dan kemitraan antarkelompok masyarakat	Persen-tase masyarakat yang terlibat aktif dalam kerjasama, gotong royong dan kemitraan budaya daerah
27. Mengembangkan pariwisata daerah	27.1 Berkembangnya jasa pariwisata	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	27.2 Meningkatnya kesempatan kerja dari kegiatan pariwisata	Pertumbuhan kesempatan kerja dari pariwisata
	27.3 Meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya para pelaku usaha jasa pariwisata	Pertumbuhan pendapatan pelaku usaha dari pariwisata

4.1.12 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Keduabelas

Dalam mendukung terwujudnya Misi Keduabelas: **Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat;** dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kedua, ketiga dan kesembilan dari RPJMN 2015-2019, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenambelas dan Mendukung Misi Kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut

Tabel 4.12
Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Keduabelas
RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
28. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa	28.1 Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
		• Kartu Keluarga
		• KTP

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		<ul style="list-style-type: none"> Akta Kelahir-an
	28.2 Tersusunnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) secara tepat waktu	Jumlah hari kerja dalam penyusunan Dokumen Anggaran Desa (APB-Des)
	28.3 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan asset desa	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Realisasi Anggaran Desa
29. Meningkatkan kinerja pemerintah desa dan kecamatan	29.1 Meningkatnya manfaat pengelolaan dana GERDEMA dan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan pendapatan desa
	29.2 Berkembangnya organisasi dan lembaga masyarakat desa	Persentase organisasi dan lembaga masyarakat desa yang aktif
	29.3 Berkembangnya forum perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan
30. Meningkatkan penataan wilayah administrasi sesuai dengan rentang kendali	30.1 Meningkatnya jangkauan pengendalian wilayah administrasi	<p>Jumlah desa yang dilayani</p> <p>Jumlah kecamatan yang dilayani</p>
	30.1 Tertatinya kawasan perdesaan	Persentase desa yang mempunyai peta desa

4.2 Prioritas dan Pembangunan

Tahap pembangunan Tahun 2018 diarahkan untuk **memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Malinau terutama peningkatan penyediaan infrastruktur, dan pengembangan UMKMK** dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- (2) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 14 Tahun dari PAUD, dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- (3) Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten;
- (4) Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (*e-Governance*) secara konsisten;
- (5) Memantapkan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan;
- (6) Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pelaksanaan GERDEMA terutama pengembangan komoditas unggulan desa;
- (7) Meningkatkan kinerja kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
- (8) Meningkatkan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan, dan pariwisata;

- (9) Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- (10) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- (11) Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
- (12) Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;

Tabel 4.13
Program Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	SKPD
1	Melaksanakan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
		Program Pendidikan Menengah	
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Pengembangan SDM Pertanian	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian dan sarana produksi pertanian	
		Program perencanaan sosial dan budaya	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	SKPD
2	Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 14 Tahun dari PAUD, dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah
		Program perencanaan pembangunan daerah	
		Program Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Sekretariat Daerah, Kecamatan
3	Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten	Program Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	Inspektorat
		Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Goverment dan Pelayanan Publik	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
4	Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (<i>e-Governance</i>) secara konsisten	Program perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Sekretariat Daerah
5	Memantapkan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pelaksanaan GERDEMA terutama pengembangan komoditas unggulan desa	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	
		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	SKPD
7	Meningkatkan kinerja kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seluruh SKPD Badan Kependidikan, Pelatihan dan Kebudayaan
8	Meningkatkan Penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan, dan pariwisata	Program pembangunan jalan dan jembatan, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertaanahan
9	Menajamkan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	Program perencanaan sosial dan budaya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah
10	Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan memperluas jaringan pemasaran	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan sarana produksi pertanian Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/PEMBANGUNAN	SKPD
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Kawasan Budidaya Program Koservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
11	Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari jasa pariwisata;	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengembangan Pemasaran Budaya	Dinas kebudayaan dan Pariwisata
12	Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran	Program pembinaan dan pengembangan perdagangan, Program pemberdayaan koperasi dan UMKM	Dinas perindustrian dan perdagangan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

5.1. Rencana Kerja

Untuk Tahun Anggaran 2018, total keseluruhan belanja sejumlah **Rp 1.434.887.757.958,- (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).**

Rincian usulan belanja langsung berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Pagu Indikatif berdasarkan program dan Kegiatan di lampirkan dalam dokumen ini.

BAB VI

PENUTUP

Tahun 2018 merupakan tahun Ketujuh periode kedua Program Gerakan Desa Membangun yang merupakan perwujudan untuk Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan RPJMD periode Tahun 2016-2021 untuk penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga Kabupaten/Kota dalam menyusun program pembangunan benar-benar telah melalui proses sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

RKPD Kabupaten Malinau pada Tahun 2018 merupakan kristalisasi dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Kemudian RKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Malinau Tahun 2018.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridohi usaha kita semua dalam membangun masa depan yang lebih cerah, maju dan berkeadilan, sejahtera lahir batin.

Malinau, Mei 2017

REKAPITULASI PAGU INDIKATIF SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2018

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
A	B	C
URUSAN WAJIB		
1	Dinas Pendidikan	54.541.978.806,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	70.511.624.602,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	16.047.754.726,00
4	BLUD	27.940.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	184.855.635.884,75
6	Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah dan Litbang	5.446.358.469,00
7	Dinas Perhubungan	10.184.774.799,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	8.834.837.630,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.436.002.811,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	795.839.000,00
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	372.779.945,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.507.588.511,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	394.370.231,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.407.370.405,00
15	Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran	20.451.796.200,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	507.534.629,00
17	Bagian Hukum	269.977.811,00
18	Bagian Tata Pemerintahan	814.340.277,00
19	Bagian Kesejahteraan Rakyat	232.024.244,00
20	Bagian Ekonomi	5.598.469.821,00
21	Bagian Pembangunan	418.200.339,00
22	Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara	234.854.278,00
23	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3.823.100.522,00
24	Bagian Perlengkapan	2.944.619.599,00
25	Bagian Organisasi	270.151.702,00
26	Bagian Umum	40.846.230.097,00
27	Bagian Humas dan Protokol	4.387.550.000,00
28	Sekretariat DPRD	25.412.114.203,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	37.540.000.000,00
30	Inspektorat	3.673.071.721,00
31	Sekretariat KORPRI	204.435.474,00
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.577.374.149,00
33	Kecamatan Malinau Kota	229.518.850,00
34	Kecamatan Malinau Utara	309.037.699,00
35	Kecamatan Malinau Barat	269.278.274,00
36	Kecamatan Malinau Selatan	269.278.274,00
37	Kecamatan Mentarang	269.278.274,00

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
38	Kecamatan Mentarang Hulu	242.771.991,00
39	Kecamatan Pujungan	269.278.274,00
40	Kecamatan Kayan Hilir	216.265.708,00
41	Kecamatan Kayan Hulu	216.265.708,00
42	Kecamatan Sungai Boh	229.518.850,00
43	Kecamatan Bahau Hulu	229.518.850,00
44	Kecamatan Kayan Selatan	216.265.708,00
45	Perwakilan Kantor Camat Long Sule	150.000.000,00
46	Kecamatan Sungai Tubu	216.265.708,00
47	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	256.025.133,00
48	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	256.025.133,00
49	Kantor Persiapan Kecamatan Malinau Utara Timur	50.000.000,00
50	Dinas Ketahanan Pangan	734.500.460,00
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.879.331.399,00
52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	425.003.432,00
53	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.244.038.697,00
URUSAN PILIHAN		
54	Dinas Pertanian	6.043.098.542,00
55	Dinas Perikanan	273.467.927,00
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.879.889.720,00
TOTAL		570.856.683.496,75